

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (UU RI No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1). Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3).

Dari pengertian diatas, maka pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam membentuk karakter seseorang. Salah satu tahapan pendidikan yang sangat berpengaruh terhadap karakter adalah pendidikan dasar (SD/MI). Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar. (Tirtaraharja, 2005:265). Dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan tersebut diharapkan dapat membentuk generasi penerus bangsa yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan dasar juga berfungsi

mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah. Pendidikan dasar merupakan *basic education* yang memberikan bekal dasar bagi pendidikan menengah dan pendidikan atas. Jadi, jika pendidikan dasarnya berkualitas, maka pendidikan menengahnya juga berkualitas. Dan jika pendidikan menengahnya berkualitas, maka pendidikan tinggi juga berkualitas.

Salah satu mata pelajaran di Sekolah Dasar yang berperan besar dalam membentuk karakter siswa adalah Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam lampiran Permendiknas No.22 Tahun 2006 dikemukakan bahwa :

“ Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 ”

Sedangkan tujuannya, adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

- a. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
- b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi.
- c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
- d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi

Dilihat dari tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yang telah disebutkan diatas, maka Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki misi sebagai pendidikan nilai. Dalam proses pendidikan nasional, PKn pada dasarnya merupakan wahana pedagogis pembangunan watak/karakter. PKn juga merupakan wahana sosial-pedagogis pencerdasan kehidupan bangsa. Hal ini sejalan dengan konsepsi fungsi pendidikan nasional membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam konteks pencapaian tujuan pendidikan nasional PKn secara substansif-pedagogis menyentuh semua esensi tujuan pendidikan nasional mulai dari iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Winataputra (2011:1.42) mengemukakan bahwa yang menjadi jantungnya dan benang emas yang mengikat unsur-unsur dalam membangun tatanan yang koheren dari semua sub sistem pendidikan kewarganegaraan adalah *civic knowledge*, yakni pengetahuan dan wawasan kewarganegaraan, *civic disposition*, yakni nilai, komitmen, dan sikap kewarganegaraan, dan *civic skill*, yakni perangkat keterampilan intelektual, sosial, personal kewarganegaraan yang seyogyanya dikuasai oleh setiap individu warga negara. Pada dasarnya, PKn menuntut terwujudnya pengalaman belajar yang bersifat utuh memuat belajar kognitif, belajar nilai dan sikap, dan belajar perilaku. Pernyataan tersebut di dukung oleh Winarno (2014: 26) yang menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tiga komponen utama yang harus dicapai oleh peserta

didik yaitu pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*).

Civic knowledge merupakan pengetahuan kewarganegaraan berkaitan dengan kandungan-kandungan atau isi apa saja yang seharusnya diketahui oleh warga negara. *Civic skill* merupakan keterampilan atau kecakapan-kecakapan kewarganegaraan seperti kecakapan intelektual dan kecakapan partisipatoris. Kecakapan intelektual meliputi kecakapan mengidentifikasi, menggambarkan, menjelaskan, menganalisis, menilai, mengambil dan mempertahankan posisi atas suatu isu. Sedangkan kecakapan partisipatoris diantaranya adalah kecakapan berinteraksi, memantau, dan mempengaruhi. Dan komponen yang terakhir adalah *Civic disposition* merupakan watak, sikap, atau karakter kewarganegaraan.

Dilihat dari ketiga komponen tersebut, PKn tidak hanya bertujuan mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan saja, Melainkan yang paling penting adalah membekali peserta didik dengan sikap/karakter kewarganegaraannya. Pembelajaran pada mata pelajaran PKn sangat penting dan sangat menentukan untuk menanamkan nilai karakter pada siswa. Nilai karakter tersebut akan membentuk kepribadian yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan. Karakter tersebut muncul apabila siswa memahami benar mengenai *civic disposition*. *Civic disposition* merupakan aspek yang sangat di tekankan pada pembelajaran PKn. Hal tersebut karena pembelajaran PKn merupakan pembelajaran nilai dengan bertujuan untuk membentuk warga negara yang bertanggung jawab.

Oleh karena itu, pada jenjang pendidikan dasar, sekolah seyogyanya dikembangkan sebagai pranata atau tatanan sosial-pedagogis yang kondusif atau menjadi suasana yang mampu mendidik kualitas pribadi peserta didik. Kualitas pribadi siswa yang terbentuk sejak dini akan menjadi bekal untuk berperan sebagai warga negara yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Dalam hal pembelajaran PKn, sangat penting agar *civic disposition* dapat terinternalisasikan kepada peserta didik. Dalam hal ini, guru merupakan komponen yang sangat penting. Guru dituntut untuk mampu merencanakan, melaksanakan dan melakukan evaluasi pembelajaran secara berkualitas agar nilai-nilai karakter dapat tertanamkan dalam diri siswa. Tidak hanya pengetahuan dan keterampilan, namun aspek paling penting adalah karakter yang harus ditanamkan pada diri siswa.

Dalam hal kompetensi pedagogik, guru PKn harus memiliki kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik sesuai dengan karakteristik mata pelajaran PKn. Guru PKn juga harus mampu menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung PKn. Guru PKn harus mampu menginternalisasikan nilai-nilai atau sikap kewarganegaraan. Karena misi utama PKn adalah agar peserta didik terbentuk sikap-sikap yang baik. Apabila sejak kecil siswa sudah mempunyai karakter atau sikap yang baik, maka ia akan menjadi warga negara yang baik. Dalam menginternalisasikan nilai atau sikap-kewarganegaraan tersebut, dapat dilakukan guru melalui perencanaan dan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan pedoman dalam melaksanakan pembelajaran. Pembelajaran di kelas dapat dilaksanakan dengan berpedoman pada perencanaan yang telah disusun. Tujuan Pembelajaran PKn yang disusun di setiap rencana atau skenario pembelajaran harus bersumber dari

tujuan pembelajaran yang disusun dalam silabus, standar kompetensi lulusan dan tujuan mata pelajaran PKN, yaitu membentuk warga negara yang cerdas, berkarakter, dan terampil.

Guru PKN harus mampu merancang perencanaan pembelajaran sesuai dengan komponen dan karakteristik pembelajaran PKN. Dalam hal ini menyangkut diantaranya adalah strategi yang digunakan, materi, dan media pembelajaran. Setiap substansi PKN memiliki tuntutan pedagogis berupa pengalaman belajar (*learning experiences*) yang diperlukan untuk mencapai tujuan Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan tersebut, guru harus mampu menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai agar nilai-nilai yang ada pada Pendidikan Kewarganegaraan dapat tertanam pada diri siswa. Selain merancang perencanaan pembelajaran, seorang guru PKN juga harus mampu melaksanakan pembelajaran di kelas yang dapat membuat siswa aktif dan tidak hanya sebatas menangkap materi saja. Dalam pelaksanaan pembelajaran PKN, guru dituntut untuk mampu menginternalisasikan nilai-nilai karakter pada siswa. Tidak hanya itu, guru juga harus mampu membuat siswa terampil dalam hal mengidentifikasi, menggambarkan, menjelaskan, dan keterampilan lain yang telah disebutkan di paragraf sebelumnya.

Kemampuan guru dalam hal merencanakan merupakan hal yang sangat penting terkait dengan pembelajaran PKN karena kualitas pembelajaran PKN dapat dilihat dari bagaimana guru merancang perencanaan pembelajaran. Strategi yang digunakan guru dalam proses pembelajaran PKN juga sangat menentukan apakah pembelajaran tersebut mampu membuat siswa memahami materi pembelajaran PKN, terampil, dan berkarater kewarganegaraan yang baik.

Pada era saat ini, banyak sekali ditemukan perilaku siswa yang kurang mencerminkan sebagai warga negara yang baik. Tidak jarang perilaku amoral yang ternyata pelakunya adalah anak usia dini. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya penanaman moral atau sikap yang baik pada diri anak. Selain pada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah juga sangat mendukung bagi terbentuknya karakter anak. Dalam hal ini, guru sangat berpengaruh dan berperan penting dalam pembentukan karakter anak. Untuk itu, seperti yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya, guru harus menjadi tokoh yang mampu menanamkan moral atau sikap yang baik pada anak. Akan tetapi, Suwarma (dalam Winarno, 2014: 55) menyatakan bahwa terdapat beberapa penelitian yang mengungkapkan secara umum kelemahan guru PKn diantaranya adalah dalam pembelajarannya, guru PKn tidak bertindak sebagai fasilitator, tetapi lebih bertindak dan berposisi sebagai satu-satunya sumber belajar.

Kelemahan umum lainnya dalam pembelajaran PKn adalah proses belajar yang masih lemah dan terperangkap dalam proses menghafal, hanya menyentuh kemampuan berpikir tingkat rendah (Suwarma, 2007). Padahal, amat diutamakan pendekatan pembelajaran yang berbasis pada berpikir kritis guna membentuk warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi. Tingkat berpikir kritis berada dalam ranah kognitif tingkat tinggi seperti analisi, sintesis, dan evaluasi. Untuk ranah berpikir kritis ini dapat dilaksanakan pada kelas tinggi.

Pengembangan sikap ilmiah pada siswa kelas tinggi di Sekolah Dasar dapat dilakukan dengan cara menciptakan pembelajaran yang memungkinkan siswa berani berargumentasi dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mendorong

siswa supaya memiliki rasa ingin mengetahui, memiliki sikap jujur terhadap dirinya dan orang lain. Guru hendaknya menggunakan strategi pembelajaran PKn yang mampu membangkitkan semangat kewarganegaraan siswa. Banyak sekali nilai-nilai karakter yang terdapat pada pembelajaran PKn. Oleh karena itu, guru harus kaya akan pengalaman dan kemampuan mengajar serta mampu untuk merancang perencanaan pembelajaran PKn yang mampu mengembangkan sikap kewarganegaraan siswa.

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan beberapa guru, temuan yang peneliti dapatkan di lapangan menunjukkan bahwa siswa SDN Pejagan 1 telah mempunyai sikap rasa ingintahu yang tinggi namun tidak semua siswa memiliki sikap tersebut. Beberapa siswa juga masih melanggar aturan sekolah dengan terlambatmasuk kelas dan tidak memakai seragam yang ditentukan. Terdapat pula siswa yang bertengkar dikarenakan perbedaan pendapat dan salah satu dari siswa tersebut tidak ada yang mengalah. Maka dari situlah peneliti ingin mengamati lebih dalam lagi mengenai perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran PKn yang mampu mengembangkan sikap kewarganegaraan siswa, karena apabila siswa telah memiliki sikap kewarganegaraan yang baik, maka tujuan pembelajaran PKn juga akan dapat tercapai. Untuk itu dilakukan penelitian dengan judul “*Civic Disposition* dalam Pembelajaran PKn Di Sekolah Dasar”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diperlukan fokus penelitian agar penelitian lebih terarah. Adapun fokus penelitian yang akan diungkap adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kondisi aktual dan kebutuhan pengembangan *civic disposition* dalam pembelajaran PKn di SDN Pejagan 1 Bangkalan ?
2. Bagaimanakah pengembangan butir-butir *civic disposition* pada penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran mata pelajaran PKn yang di SDN Pejagan 1 Bangkalan ?
3. Bagaimanakah pengembangan butir-butir *civic disposition* siswa pada pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran PKn yang di SDN Pejagan 1 Bangkalan ?
4. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi guru dalam pengembangan butir-butir *civic disposition* pada penyusunan RPP dan pelaksanaan pembelajaran PKn di SDN Pejagan 1 di SDN Pejagan 1 ?
5. Bagaimana upaya-upaya guru untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penyusunan RPP dan pelaksanaan pembelajaran PKn di SDN Pejagan 1 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kondisi aktual dan kebutuhan pengembangan *civic disposition* dalam pembelajaran PKn di SDN Pejagan 1 Bangkalan.
2. Untuk mengetahui pengembangan butir-butir *civic disposition* pada penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran PKn di SDN Pejagan 1 Bangkalan.

3. Untuk mengetahui pengembangan butir-butir *civic disposition* pada pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran PKn di SDN Pejagan 1 Bangkalan.
4. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi guru dalam penyusunan RPP dan pelaksanaan pembelajaran PKn di SDN Pejagan 1 Bangkalan.
5. Untuk mengetahui upaya-upaya guru untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penyusunan RPP dan pelaksanaan pembelajaran PKn di SDN Pejagan 1 Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap wawasan bagi pengembangan pendidikan terutama dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

2) Manfaat Praktis

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut :

a. Manfaat Praktis Bagi Peneliti

Dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peneliti mengenai penerapan pembelajaran PKn yang baik di sekolah dasar yang dapat dijadikan sebagai acuan belajar yang nantinya dapat diaplikasikan ketika peneliti menjadi tenaga pendidik yang sebenarnya

b. Manfaat Praktis Bagi Sekolah

Dapat memberikan kontribusi yang positif bagi sekolah itu sendiri maupun sekolah-sekolah yang lain mengenai peningkatan kualitas pembelajaran yang baik

c. Manfaat Praktis Bagi Guru

Dapat membantu guru untuk melaksanakan pembelajaran lebih maksimal sehingga kompetensi yang diinginkan akan tercapai.

1.5 Asumsi Penelitian

Sebuah pembelajaran PKn yang didasarkan pada *civic disposition* memang harus diterapkan, karena pembelajaran PKn merupakan pembelajaran moral. Penelitian yang akan dilaksanakan pada SDN Pejagan 1 ini adalah mengenai sebuah pengembangan pembelajaran yang berbasis *civic disposition* pada mata pelajaran PKn. Peneliti dapat mengetahui mengenai butir-butir *civic disposition* apa saja yang dikembangkan dalam pembelajaran PKn baik dalam segi perencanaan dan pelaksanaannya.